

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR KENCANA MANDIRI
TAHUN 2024**



**Jl. Hayam Wuruk No. 53 Jelutung Jambi 36133
TELEPON: 0741-7553320**

PENJELASAN UMUM

Semakin meluasnya pelayanan disertai meningkatnya volume usaha pada industri perbankan, maka semakin meningkat pula risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja perbankan dan melindungi pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, maka pentingnya penerapan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada perbankan terutama di Bank Perkreditan Rakyat. Melalui struktur pengendalian internal yang terpadu dan penerapan GCG yang baik diharapkan BPR dapat terhindar atau meminimalkan dampak buruk atas risiko yang kemungkinan akan terjadi pada BPR.

Untuk penerapan suatu Good Corporate Governance yang baik, maka BPR harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keterbukaan (Transparency)

Yaitu keterbukaan dalam memberikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan

b. Akuntabilitas (Accountability)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.

c. Tanggung Jawab (Responsibility)

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip pengelolaan Bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya.

d. Independensi (Independency)

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (Fairness)

Yaitu keadilan/ kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR KENCANA MANDIRI
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No. 53 Jelutung Jambi 36133
Nomor Telepon	0741-7553320
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	3
Predikat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Arie Kustiyarto
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam			

<p>menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.</p> <p>d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.</p> <p>e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti</p> <p>f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.</p> <p>g. Inovasi proses kredit secara digital telah diimplementasikan sejak 01 Juli 2024.</p>
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Djodi suhardi
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi</p> <p>b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank</p> <p>c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.</p>		
	Rekomendasi Kepada Direksi :		
	<p>a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.</p> <p>b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.</p> <p>c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.</p> <p>d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.</p> <p>e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024.</p> <p>f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.</p> <p>g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.</p>		
	Penjelasan Lebih Lanjut :		
	Nihil		

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
tidak membentuk komite audit, pemantau risiko, dan Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Tidak membentuk komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		

	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
tidak membentuk komite			

C. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Arie Kustiyarto	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada kepemilikan saham anggota direksi baik di BPR Kencana Mandiri ataupun di BPR Lain			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Arie Kustiyarto	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut XYZ :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Direksi dengan Anggota direksi lain, Anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham				

D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat adanya hubungan keluarga antar anggota direksi, Anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat adanya hubungan keluarga antar anggota direksi, Anggota dewan komisaris, maupun pemegang saham				

E. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota komisaris tidak memiliki saham di BPR Kencana Mandiri			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Djodi suhardi	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain tidak ada.				

F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Djodi suhardi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris baik sesama Anggota Dewan komisaris lainnya, Direksi, maupun pemegang saham				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan anggota komisaris lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham				

G. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp390.000.000	2	Rp234.000.000
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp390.000.000		Rp234.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi dan Komisaris menerima gaji/Honorarium sesuai dengan hasil keputusan RUPS					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Hasil RUPS.			

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.95 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.29 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.95 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.58 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rasio gaji diperoleh dengan memperhitungkan gaji dan tunjangan Pegawai, Direksi, dan Dewan Komisaris yang disetahunkan selama tahun 2024.	

I. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	03 Januari 2024	4	RUPS via Zoom dengan pemegang saham
2.	27 Maret 2023	9	Meeting NPL dan fokus terhadap penurunan NPL
3.	09 Januari 2024	15	Sosialisasi Slik kepada AO dan Collector
4.	05 Februari 2004	26	Meeting bulanan, membahas secara keseluruhan kendala yang dihadapi tiap bagian
5.	26 Februari 2024	14	Meeting gabungan AO dan kolektor 1. Proyeksi & action NPL per 29/02/24 2. Potensi kenaikan NPL 3. Kredit BPR Kencana di tahan agartidak naik k NPL
6.	13 Maret 2024	10	meeting Mingguan AO & Collector 1. Prospek debitur masing2 2. Collector fokus ke debitur NPL 3. Debitur NPL didata ulang dan dikunjungi satu persatu
7.	26 Maret 2024	9	Meeting proyeksi NPL per Maret 2024
8.	02 April 2024	13	Meeting pencapaian bulan maret 2024
9.	30 April 2024	12	meeting target akhir bulan April 2024
10.	07 Mei 2024	4	Meeting Direksi & Komisaris
11.	29 Mei 2024	13	Proyeksi NPL yang besar

			Fokus ke debitur NPL yang besar
12.	19 Juni 2024	10	Meeting AO & Collector
13.	03 Juli 2024	11	Meeting AO & Collector
14.	25 Juli 2024	7	Sharing Knowledge CKPN
15.	01 Agustus 2024	9	Meeting pencapaian Juli 2024
16.	10 September 2024	10	Meeting AO & Collector
17.	19 September 2024	8	Meeting Kinerja AO Meningatkan kembali tentang target masing2 AO dan dibulan Nov dapat mencapai target
18.	01 Oktober 2024	9	Meeting NPL
19.	17 Oktober 2024	100	1. Tanggung jawab collector 2. Melakukan tugas sesuai job desk 3. Pembagian coll 1,2,3,4 dan 5
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dari Januari sampai Desember Tim sudah melakukan strategi stragegi untuk melakukan penagihan serta pencairan kredit sesuai target yang telah diberikan.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Djodi suhardi	5	0	26.32%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh kegiatan rapat Dewan Komisaris tahun 2024 dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris				

J. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat penyimpangan internal selama periode laporan								

K. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
terdapat permasalahan hukum yang terjadi Selama tahun 2024.		

L. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

0 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)

0 kasus

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian

1 kasus

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian

0 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Nihil.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR KENCANA MANDIRI untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Jambi, 30 Januari 2024

PT. BPR KENCANA MANDIRI

Disusun Oleh,



Sari Ramadanis
PE MR & HRD

Menyetujui,



Arie Kustiyarto
Direktur